



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

DKI Rugi Ratusan Miliar

Desak Ahok Batalkan Kerjasama Lahan Mangga Dua

SIKAP lunak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap PT Duta Pertiwi dipertanyakan sejumlah kalangan. Padahal berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DKI mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah akibat kerjasama dengan PT Duta Pertiwi atas pemanfaatan lahan seluas 30,88 hektar di Mangga Dua, Jakarta Utara. Terlebih kerjasama telah terjalin sejak tahun 1990-an.

Ketua Komisi C (bidang aset) DPRD DKI Jakarta Santoso merasa heran dengan ketidaktegasan gubernur. "Kami sudah minta agar dibatalkan kerjasama tersebut. Tapi sejauh ini belum dilakukan," ujar dia kepada INDOPOS, kemarin (9/9).

Pria yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta itu menantang gubernur agar berani memutus perjanjian kerjasama. Terlebih berdasarkan peraturan, perjanjian itu juga sudah berakhir masa berlakunya. "Seharusnya Pak Ahok tidak perlu berpikir panjang lagi untuk memutus perjanjian. Data dan faktanya sudah jelas, DKI memang dirugikan," kata Santoso.

Bila Pemprov DKI memperpanjang kerjasama tersebut, sambung dia, maka harus dilaksanakan secara teliti dan cermat. Salah satunya terkait besarnya keuntungan. "Perjanjian baru nanti, seandainya mau dibuat harus menguntungkan pemprov," tegas Santoso.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD DKI atas LHP BPK Triwisesana mengungkapkan, terus menindaklanjuti temuan BPK, terhadap laporan keuangan Pemprov DKI, terkait dugaan kerugian negara hasil kerja sama dengan pihak swasta terhadap aset-aset milik Pemprov.

Salah satunya, terkait aset DKI yang terletak di Mangga Dua, yang saat ini berubah fungsi menjadi kawasan komersil. Padahal

sebelumnya lahan itu merupakan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

"Ini sesuai dengan temuan BPK ada beberapa sertifikat yang tidak ditemukan, baik di Pemprov maupun di PT Duta Pertiwi sebagai pihak yang diajak kerja sama. Kedua sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nya juga mencakup semua tanah hasil kerja sama," kata Tri.

Dia mengungkapkan, BPK menemukan beberapa hektar tanah yang tidak memiliki sertifikat, namun sudah menjadi kawasan komersial. "Ada beberapa bidang tanah 18 hektare yang tidak ditemukan sertifikatnya di kedua belah pihak, tetapi sudah berdiri bangunan-bangunan komersial. Kami sudah mengecek ke lapangan melihat situasi hasil audit itu," jelas dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono membantah semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal aset di Mangga Dua.

Menurut Heru, kenyataan di lapangan bisa saja berbeda dengan hasil audit BPK. "Di sini persepsi setiap orang berbeda. Apa yang dimaksud dengan HPL (hak pengelolaan lahan) harus dijelaskan kepada ahli pertanahan dulu nih. Apa yang dimaksud dengan HPL apa yang dimaksud HGB (hak guna bangunan)," tegas dia.

Ia mengatakan, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah seluruh lahan di Mangga Dua merupakan milik Pemprov DKI. Sebab bila ada yang bukan milik daerah, maka wajar bila tidak memiliki sertifikat HPL. **(wok)**

KERJASAMA DKI DENGAN PT DUTA PERTIWI

- ✓ Luas lahan 30,88 hektar di Mangga Dua, Jakarta Utara
- ✓ Kerjasama sejak tahun 1990-an
- ✓ Peruntukan Lahan
- ✓ Semula lahan digunakan untuk lokasi pemakaman
- ✓ 'Lalu 'disulap' menjadi kawasan komersil